



Melacak Materialisme Dialektis Tan Malaka Dalam Sejarah Ilmu Sosial Indonesia¹

Gregorius Ragil Wibawanto²

Abstraksi

Artikel ini melacak ulang kemunculan materialisme dialektis Tan Malaka di tahun 1920an dan membahas posisinya dalam sejarah ilmu sosial Indonesia. Studi pendahuluan telah berkontribusi pada kajian-kajian mengenai sejarah komunisme di Indonesia secara general dan pemikirannya secara partikular. Artikel ini mencoba memberikan paparan mengenai materialisme dialektis Tan Malaka dan perjalannya melintasi konteks kebangkitan nasional, pendudukan Jepang, orde lama, orde baru, dan merefleksikannya dalam konteks hari ini. Artikel ini menggunakan metode *linguistic contextualism* oleh Quentin Skinner dengan revisi Parekh dan Berki mengenai pentingnya mempertimbangkan ide-ide universal yang dapat melintas konteks. Dengan berbasis pada prosedur metodologis tersebut, artikel ini berargumen bahwa materialisme dialektis Tan Malaka memberikan kerangka filosofis dan saintifik yang relevan untuk digunakan dalam memindai sejarah produksi pengetahuan di Indonesia.

Kata kunci: *Tan Malaka, Materialisme Dialektis, linguistic contextualism, Komunisme, Produksi Pengetahuan.*

Abstract

This article traces the emergence of Tan Malaka's dialectical materialism in 1920s and examines its relevance during his life and following his death in 1949. Previous studies on Tan Malaka have contributed to the literature on the history of communism in Indonesia in general and of communist thought in particular. This study attempts at doing so by tracing the origins of Tan Malaka's thinking and following through four different historical backgrounds namely the national awakening period up to Japanese occupation (1920-1942), the revolution period until the fall of Soekarno (1942-1966), the New Order period (1965- 1998), and finally the post-authoritarian Indonesia up to the present (1998- 2019). In interpreting Tan Malaka's writings on dialectical materialism, I make use of Skinner's linguistic contextualism with Parekh and Berki's revision on the importance of considering universal and timeless truth ideas. Basing on this methodological procedure, this thesis argues first that Tan Malaka's dialectical materialism provides a 'philosophical' and 'scientific' to examine the history of knowledge production in Indonesia

Keywords: *Tan Malaka, Dialectical Materialism, linguistic contextualism, Communism, Knowledge Production*

A. Latar Belakang

Tan Malaka dibicarakan dan digambarkan dengan berbagai wajah. Alfian dalam telaahnya tentang Tan Malaka menyebutnya sebagai 'Pejuang Revolusioner yang Kesepian' (Alfian, 1977:57). Muhammad Yamin menempatkan Tan Malaka sebagai pendiri bangsa; sejajar dengan George Washington dan Jose Rizal (Yamin, 1946:3).

Menurut Yamin, Naar de 'Republiek Indonesia' yang ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1925 di Singapore merupakan manifesto politik pertama di Indonesia yang membentuk imaji bangsa (Yamin, 1946). Jacques de Kadt, jurnalis asal Belanda yang dekat dengan Sjahrir (Mrazek, 1994:215) menganggap Tan Malaka sebagai Trotskyite radikal yang serius dan tahan-banting (Poeze, 2008a:328).

¹ Untuk kutipan atau sitasi artikel ini: Wibawanto, Gregorius Ragil. 2019. "Melacak Materialisme Dialektis Tan Malaka dalam Sejarah Ilmu Sosial Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol.6 (2): 169-190

² Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Kontak: gregorius.rw@gmail.com

Sukarno yang sempat bersitegang dengan Tan Malaka pada periode revolusi justru mengangkatnya sebagai pahlawan nasional pada 23 Maret 1963 melalui Keputusan Presiden No.53 Tahun 1963.

Gambaran Tan Malaka yang cenderung mesianistic dan heroic tersebut di atas bersanding dengan potret-potret lain yang mengandung tekstur pejoratif. Aidit – pada pidato hari jadi PKI ke-35 – menganggap Tan Malaka sebagai ‘pemimpin partai yang tidak bertindak tegas sebelum pemberontakan (1926-27) dimulai, tetapi malah menyalahkan pemberontakan sesudah pemberontakan terjadi’ (Aidit, 1955:15). Abu Bakar Lubis – mahasiswa kedokteran yang mengagumi Sjahrir dan yang ditugasi Sukarno ‘menjemput’ Tan Malaka – menganggapnya irrasional dan tidak realistis (Poeze, 2008:316).

Penggambaran yang kental dengan elemen biopic ditambah dengan sentimen anti-komunisme yang menyejarah, mengaburkan dimensi pemikiran Tan Malaka. Kajian-kajian mendalam tentang gagasan Tan Malaka dan permenungannya akan bentuk negara-bangsa yang ideal tidak mampu menandingi kuatnya narasi Tan sebagai seorang komunis, pahlawan nasional, dan tokoh misterius. Faktanya, beberapa sejarawan telah mencoba untuk menghasilkan studi pemikiran Tan dari berbagai sudut pandang. Rudolf Mrazek, misalnya, melakukan penelusuran genealogi semesta gagasan Tan Malaka dengan mengunjungi kembali sensibilitas minang (Mrazek, 1972:7-9). Kajian terbaru dari Oliver Crawford tentang pemikiran politik Tan Malaka menawarkan cara pandang hybrid dalam memindai pemikir Asia yang hidup di periode pasca krisis ekonomi dunia tahun 20an

(Crawford, 2018), di mana arus persilangan ide menjadi semakin intens yang kemudian mendorong pergerakan nasional di beberapa negara Asia, yang dalam konteks Hindia Belanda disebut Takashi Siraishi sebagai *age in motion* atau periode zaman bergerak (Shiraishi, 1990:xv). Tan Malaka, dalam hal ini, adalah salah satu pemikir yang lahir di konteks yang dinamis tersebut.

Meskipun usaha pendalaman gagasan Tan Malaka berkontribusi signifikan pada pengembangan studi pemikiran di Indonesia, kajian-kajian tersebut cenderung fokus pada usaha untuk menautkan permenungan Tan Malaka pada konteks politik praktis dan geliat nasionalisme sejak konteks zaman bergerak sampai pada periode kemerdekaan. Sejauh ini, upaya untuk membaca Tan Malaka dalam konteks produksi pengetahuan sosial di Indonesia belum terekplorasi secara mendalam.

Dengan mengaplikasikan metode *linguistic contextualism* yang diformulasikan oleh Quentin Skinner (1969), artikel ini mencoba untuk membaca genealogi materialisme dialektis Tan Malaka dalam dinamika sejarah ilmu sosial Indonesia sebagai konsep penting yang mendasari struktur pemikiran Tan Malaka. Artikel ini dilandasi oleh dua pertanyaan sentral. Pertama, bagaimana Tan Malaka mengadaptasi metode materialisme dialektis ke dalam konteks Indonesia? Kedua, bagaimana relevansi materialisme dialektis Tan Malaka dalam sejarah perkembangan ilmu sosial Indonesia? Dalam melacak posisi materialisme dialektis Tan Malaka dalam sejarah produksi ilmu sosial Indonesia, artikel ini mengeksplorasi sumber-sumber utama karya Tan Malaka dan sumber sekunder sebagai penjas konteks. Selain itu, artikel ini juga

mempertimbangkan studi-studi pendahulu yang akan dielaborasi berikut ini.

B. Studi-Studi Pendahulu

Dalam pustaka-pustaka termutakhir, Tan Malaka diinterpretasikan dengan beberapa pendekatan. Dari beberapa studi tersebut, setidaknya terdapat dua fokus utama dalam mendekati Tan Malaka. Pertama, studi yang fokus pada kaitan antara sejarah biografi Tan Malaka dan konteks revolusi Indonesia. Secara umum, kategori ini memposisikan Tan Malaka sebagai tokoh marxis yang terlibat dalam pergerakan di puncak periode kebangkitan nasional (1920'an) sampai era awal kemerdekaan. Kategori kedua fokus pada investigasi pemikiran Tan Malaka tentang agama, sejarah, dan ide formasi negara-bangsa serta karakteristik masyarakat Indonesia. Kedua kategori berkontribusi terhadap pemahaman akan Tan Malaka secara partikular dan debat intelektual sejarah pemikiran secara general. Artikel ini mempertimbangkan kedua arus studi tersebut dalam analisis terhadap materialisme dialektis Tan Malaka.

Di antara kategori pertama adalah Ruth McVey, yang menulis catatan kronologi sejarah komunisme di Indonesia. Dalam bukunya, *The Rise of Indonesian Communism*, ia mengelaborasi peran Tan Malaka dalam dinamika perkembangan komunisme selama periode kebangkitan nasional. McVey menyajikan detail rekaman historis keterlibatan Tan Malaka di Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk kontribusi Tan Malaka dalam mendirikan Sekolah SI (Sarekat Islam);

dukungannya pada proyek peleburan gerakan Islam dengan Komunisme; serta aktivitas politik Tan Malaka dalam pengasingan (McVey, 1965: 119, 161-162).

Sejalan dengan McVey dalam membahas karir politik Tan Malaka, Anderson memberikan analisis manuver politik Tan pada konteks yang berbeda. Dalam buku klasiknya *Java in a time of Revolution*, Anderson mendedikasikan satu bab khusus untuk mengelaborasi siasat Tan Malaka dalam membentuk kelompok oposisi pertama terhadap republik, Persatuan Perjuangan (PP). Dibentuk oleh Tan pada tahun 1946, kelompok ini menentang proses negosiasi antara Indonesia dan Belanda (Anderson, 1972:269-295). Bagi PP, keputusan republik untuk berkompromi dengan Belanda demi pengakuan internasional dan kedaulatan politik bukanlah strategi yang tepat. Tan Malaka adalah tokoh sentral gerakan ini, seperti diungkapkan oleh Amir Sjarifudin bahwa 'Geestelijke vader (godfather) daripada PP adalah persona Tan Malaka, tokoh dengan "magnetische persoonlijkheid" (magnetic personality), cerdas, tajam, dan terberkati dengan kemampuan persuasi yang mumpuni (Poeze, 2008a:321). Menurut Anderson, 'kampanye PP sampai pada klimaks yang sukses; kelompok-kelompok yang berbeda bergabung dengan PP dan mengakibatkan pemerintahan baru terisolasi' (Anderson, 1972:295).

Kahin dalam bukunya *Nationalism and Revolution in Indonesia* memiliki pendapat yang berbeda soal PP. Baginya 'Usaha-usaha oposisi yang dilancarkan oleh PP hanya sedikit mengubah relasi dan pola distribusi kuasa' (Kahin, 1952:192).

Perbedaan analisis Kahin dan Anderson berakar pada lingkup linimasa historis yang menjadi perhatian. Anderson menyelidiki dinamika PP terbatas pada momentum klimaks di tahun 1946, sedangkan Kahin meneruskan analisisnya hingga tahun 1949. Dalam hal ini, keberhasilan peran oposisi Tan Malaka dalam memimpin PP masih dapat diperdebatkan. Studi Harry Poeze, yang mencakup seluk-beluk perjalanan sejarah Tan Malaka hingga detail-detail keterlibatannya dalam proses merebut kedaulatan, secara lebih lanjut dapat digunakan sebagai acuan dalam diskusi soal signifikansi peran politik Tan Malaka (Poeze, 1988;2008).

Meskipun studi-studi tersebut di atas telah memberikan pemahaman mendasar terkait keterlibatan Tan Malaka dalam perkembangan komunisme dan perjuangan revolusi; pemikiran dan gagasan Tan Malaka belum dibahas secara komprehensif. Crawford, dalam telaahnya soal pemikiran politik Tan Malaka beranggapan bahwa 'oleh karena kronik revolusi difokuskan secara kronologis pada peristiwa-peristiwa besar, analisis yang sibuk pada fakta historis tidak mampu menangkap gelombang pemikiran Tan Malaka' (Crawford, 2018:18). Akibatnya, kerja-kerja penelitian tersebut di atas hanya menangkap potret Tan Malaka sebagai pemimpin politik, bukan sebagai intelektual.

Rudolf Mrazek, dalam hal ini, berusaha untuk membongkar struktur pikir Tan Malaka sebagai seorang intelektual. Menurut Mrazek, karya-karya Tan Malaka secara mendalam terpengaruh oleh sensibilitas Minangkabau; utamanya adalah konsep rantau. Madilog, bagi Mrazek, merupakan

buah rantau untuk masyarakat Indonesia secara umum dan Minang secara khusus (Mrazek, 1972:18). Lebih lanjut, Mrazek berpendapat bahwa konsep dialektis dalam formulasi ide Tan Malaka berakar pada 'semesta' Minang sebab 'secara umum, filosofi tradisional Minang menganggap konflik sebagai bagian esensial untuk mencapai integrasi dalam masyarakat; Alam Minangkabau selalu berelasi dengan perspesi dialektis atas harmoni dari kontradiksi' (Mrazek, 1972:3).

Bersebrangan dengan Mrazek, Helen Jarvis berpendapat bahwa Tan Malaka harus didekati 'dalam kerangka marxisme' dan ia juga menganggap analisis Mrazek sangat orientalis dan menggurui (Jarvis, 1991:lxvi). Menurut Jarvis, ide-ide Tan Malaka harus dipahami secara tekstual dan kontekstual di mana dia belajar Marx dan Engels di masa Perang Dunia I, tepat ketika Tan berada di Harlem, Belanda (Jarvis, lxxxii). Dalam volume pertama memoarnya, Tan menulis bahwa dirinya memahami revolusi dari Karl Marx, Karl Kautsky, Friedrich Engels, dan dari pamflet yang mengupas Revolusi Bolshevik 1917 (Malaka, 2000:41).

Berkaca dari Mrazek dan Jarvis, Crawford – dalam disertasinya *The Political Thought of Tan Malaka* – berpendapat bahwa 'sementara Tan Malaka memandang Marxisme sebagai produk dari prosedur analisa barat, dia juga mengelaborasinya melalui tutur Malay dan Islam ketika mengekspresikan argument marxisnya sendiri, dengan tujuan menjadikan formulasinya dapat diterima masyarakat Indonesia' (Crawford, 2018:10). Berdasarkan proposisinya, Crawford lebih lanjut menjelaskan bahwa karya-karya Tan Malaka 'merupakan sintesis bahasa politik yang

mengandung variasi artikulasi' (Ibid). Menurut Crawford, karakter sintesis pemikiran Tan Malaka merupakan konsekuensi historis atas periode kebangkitan nasional di mana 'ide-ide baru tersirkulasi secara acap di Hindia Belanda dan terkonsolidasi secara otentik' (Ibid: 212).

Secara mendasar, penulis sepakat dengan analisa Crawford bahwa karakter pemikiran sintesis Tan Malaka merupakan produk periode kebangkitan nasional. Meskipun demikian, analisa 'menyejarah' yang taat pada konteks justru membatasi refleksi atas pemikiran Tan Malaka. Kelanjutan relevansi gagasan Tan Malaka hari ini belum terselediki secara mendetil. Apakah pemikiran sintesis Tan Malaka dapat dikatakan relevan? Bagaimana ide-ide materialisme dialektisnya dapat melampaui zaman?

Berkaitan dengan dua pertanyaan tersebut, kritik Magnis Suseno atas pemikiran Tan Malaka – utamanya pada konsep materialisme dialektis – barangkali penting untuk dipertimbangkan. Menurut Suseno, 'Tan Malaka hanya mengulang-ulang konsepsi Engels tanpa menyajikan cara baru dalam mengupasnya' (Suseno, 2003:208). Bagi Suseno, hal itu merupakan masalah mendasar dalam landasan filosofis Tan Malaka sebab doktrin materialisme dialektis Engels sendiri mengandung permasalahan yang cukup akut oleh karena pencampuradukkan konsep materialisme dan realisme (Suseno, 2003:206). Dengan demikian, secara provokatif, Suseno bertanya 'apakah Madilog memiliki relevansinya di Indonesia hari ini, atau bahkan pemikiran yang demikian terlanjur usang sejak zamannya ketika Tan Malaka menuliskannya? (Suseno, 2003:218).

Meskipun kritik Suseno perlu dipertimbangkan, struktur kajiannya memiliki dua lubang analisis yang cukup besar. Pertama, tidak seperti Crawford, Mrazek, dan Jarvis yang secara ekstensif 'berkonsultasi' dengan karya Tan Malaka yang lain serta menggunakan rekam-sejarah sebagai penjas konteks, Suseno menginterpretasikan materialisme dialektis tanpa dukungan fakta empiris yang solid sebagai konteks di mana Tan Malaka mengembangkan ide-idenya. Akibatnya, dia mengambil lompatan terlalu jauh dalam menggeneralisasi karakter materialisme dialektis Tan Malaka. Pendek kata, kritik Suseno atas gagasan Tan Malaka hanya menjadi relevan dalam perbincangan filosofis semata di mana elemen historis deskriptif kehilangan signifikansinya.

Belajar dari analisis pendahulu soal Tan Malaka, artikel ini bermaksud mengisi celah pengetahuan yang masih terbuka dengan menyelidiki relevansi materialisme dialektis Tan Malaka dalam sejarah perkembangan ilmu sosial Indonesia. Dalam melakukannya, artikel ini mengunjungi kembali muasal dari materialisme dialektis Tan Malaka dan mengikuti perjalanannya hingga periode orde baru serta merefleksikannya di konteks Indonesia hari ini. Konsekuensi metodologis dari tujuan tersebut dijelaskan pada bagian berikut ini.

C. Pendekatan *Linguistic Contextualism*: Sebuah Metode

Artikel ini menggunakan teks-teks utama Tan Malaka sebagai sumber primer, yang antara lain: SI Semarang dan Onderwijs (1921), Parlemen atau Soviet (1922), *Naar de 'Republiek Indonesia'*

(1925), Semangat Moeda (1926), Aksi Massa (1926), Madilog (1943), dan Dari Penjara ke Penjara (1947-1948).

Selain teks-teks Tan Malaka, artikel ini juga memanfaatkan sumber sekunder yang relevan dan efektif sebagai penjelas konteks. Sumber-sumber tersebut termasuk namun tidak terbatas pada studi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana sumber-sumber tersebut dipahami dan dimaknai.

Artikel ini menggunakan pendekatan *linguistic contextualism* Quentin Skinner. Metodenya merupakan kritik atas dua pendekatan besar yang populer digunakan untuk mendedah sejarah pemikiran. Pertama adalah tradisi interpretasi *great text* yang percaya bahwa 'teks itu sendiri cukup sebagai objek pencarian dan pemahaman' (Skinner, 1969:4). Menurut Skinner, metode *great text* bermasalah karena mengasumsikan bahwa ide-ide bersifat 'timeless' sehingga tidak memerlukan penjelasan konteks yang komprehensif. Namun demikian persoalan atas keterbatasan metode *great text* tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan *contextualism* semata, sebab bagi Skinner penjelasan konteks yang tidak proporsional akan menimbulkan distorsi interpretasi oleh karena asumsi bahwa karya-karya pemikir hanya akan dibaca sebagai pantulan dari struktur sosial-politik masyarakatnya (Skinner, 1969:5).

Skinner menawarkan metode linguistik sebagai jalan untuk memahami intensi pemikir secara jernih tanpa terjebak pada tradisi *great text* yang sempit dan *contextualism* yang berlebihan.

Menurut Skinner, 'pemahaman akan teks memerlukan kejelian dalam menangkap meaning yang dimaksudkan oleh pemikir dengan mengandalkan perkakas linguistik seperti ujaran, tutur, frasa, yang membentuk "rangkai-deskripsi" atas struktur gagasan pemikir' (Skinner, 1969:49-50).

Artikel ini akan menggunakan metode tersebut dalam memahami materialisme dialektis Tan Malaka pada setting kemunculannya. Sebagai konsekuensinya, pemahaman akan teks-teks Tan Malaka akan mempertimbangkan 'rangkai-deskripsi' yang membangun habitus produksi pengetahuan di era Kebangkitan Nasional. Tantangan yang kemudian muncul dari metode ini adalah proses kontekstualisasi gagasan Tan Malaka di luar 'rangkai-deskripsi' ketika pemikirannya ditaruh pada historical setting yang berbeda dari konteks kemunculannya. Menurut metode linguistik Skinner, interpretasi lintas konteks tidak memungkinkan untuk dilakukan karena ketiadaan 'timeless truth' dan 'universal ideas'. Olehnya, ide harus dibaca dalam 'rangkai-deskripsi' yang partikular dan periodik. Prosedur ini kemudian membatasi lompatan reflektif yang perlu dilakukan untuk menganalisis pemikiran Tan Malaka di luar struktur linimasa yang melatarinya. Terkait limitasi ini, revisi Bikhu Parekh dan R.N Berki atas metode Skinner menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Parekh dan Berki berpendapat bahwa metode linguistik Skinner mengandung tiga problem utama. Pertama, asumsi Skinner bahwa pemikir hanyalah persoalan fakta historis yang perlu dibaca secara berjarak dengan perkakas bahasa. Kedua, oleh karena poin pertama, Skinner

berpandangan bahwa tidak ada pemikir yang melakukan permenungan melampaui partikularitas zamannya. Ketiga, 'pemaksaan' Skinner atas karya pemikir besar untuk dibatasi pada garis-garis linguistik (Parekh & Berki, 1973:172-174).

Tiga poin tersebut yang kemudian menjadi dasar Parekh dan Berki untuk menyusun empat poin sentral tawaran metodologis. Pertama, hubungan teks dan konteks adalah kontruksi intelektual yang dapat dibentuk dalam mengkaji sejarah pemikiran. Kedua, analisis gagasan tidak melulu soal isolasi konteks sejarah, meskipun tetap harus menghormati latar semangat zaman yang membentuknya. Ketiga, bias konteks dan individu dapat diidentifikasi dengan peta mazhab, tradisi, dan periode; bukan dihindari demi mendapatkan 'intensi-kejernihan' yang problematis. Keempat, analisis pemikiran bukan sesuatu yang fix melainkan terus tumbuh dan dikoreksi seiring dengan jalannya sejarah (Parekh & Berki, 1973:183-184). Materialisme dialektis Tan Malaka, dalam hal ini, akan dikupas dengan berbekal metode linguistik Skinner dengan dukungan empat poin koreksi dari Parekh dan Berki.

D. Genealogi Materialisme Dialektis Tan Malaka

D. 1. Laku Kontradiktif

Struktur pembentuk gagasan materialisme dialektis Tan Malaka mengandung tiga blok historis yang lekat dalam perjalanan hidup Tan Malaka. Pertama adalah masa-masa remaja di Suliki, Payakumbuh, Sumatera Barat di mana sensibilitas Minang berperan sebagai penyedia 'rangkai-deskripsi' pemikirannya termasuk konsep rantau.

Kedua adalah rantau pertama di Belanda sepanjang tahun 1913-1919 di mana ia bersinggungan dengan tradisi berpikir Eropa dan gejolak Revolusi Bolshevik. Ketiga adalah masa-masa keterlibatannya dalam pergerakan komunis pada tahun 1921. Periode setelahnya, menurut penulis, adalah pengembangan, penajaman, sekaligus penerapan proses berpikir Tan Malaka dalam gelanggang politik nasional dan internasional.

Lahir di Desa Suliki, Sumatera Barat pada tahun 1897 dari keluarga Muslim taat yang kental dengan sensibilitas Minang membuat Tan Malaka memiliki optimisme yang solid akan kekuatan-mengubah dari Islam dan konsep rantau (Poeze, 1988:12). Sekolah dasar di desanya dan surau adalah arena belajar sekaligus ruang eksperimen. Di situlah dia pertama kali berhadapan-hadapan dengan sintetisitas pendidikan Eropa dan sensibilitas minang. Segera setelah ia lulus sekolah dasar, Tan masuk 'Kweekschool' atau sekolah guru di Fort de Kock. Tidak butuh waktu lama bagi G.H Horensma, guru Kweekschool, untuk melihat potensi Tan Malaka dan mengirimnya masuk sekolah guru di Belanda (Malaka, 2008:25).

Di Belanda, Tan mendapatkan kesempatan besar untuk belajar ide-ide baru melalui tiga lingkungan yang berbeda, yakni tempat tinggalnya, sekolahnya, dan pergerakan nasionalis Indonesia di Belanda. Salah satu momentum signifikan dalam perjalanan intelektual Tan Malaka adalah ketika dia tinggal bersama dengan Herman, pensiunan muda tentara Belgia yang menyuplai Tan dengan brosur bernada sentimen anti imperialisme dan Van der Mey, yang selalu memberi Tan Malaka terbitan De Telegraaf, yang cenderung simpati dengan Inggris

(Malaka, 2008a:25). Selain itu, di Jacobijnestraat, tempat tinggalnya terdapat toko buku yang sering Tan kunjungi, di mana dia pertama kali menjumpai Nietzsche melalui *Die Umwertung aller Werte* dan buku-buku yang membahas Revolusi Prancis (Poeze, 1988:70).

Dalam memoarnya Tan mengakui bahwa 'meskipun fase awal di Harlem menyediakan kesempatan belajar yang mengagumkan, pandangan terhadap ide-ide pembebasan terasa kabur dan tidak solid' (Malaka, 2000a:45). Pengendapan intelektualnya semakin menebal pasca Revolusi Bolshevik 1917, melalui mana Tan tiba pada teks-teks Marx, Karl Kautsky, Trotsky, dan Lenin (Malaka, 2000a:41).

Aktivitas politiknya dimulai ketika Tan muncul dalam rapat Perhimpunan Indonesia (PI) dan berjumpa dengan Suwardi Suryaningrat dan Gunawan Mangunkusumo. Selain itu, dia juga mulai menulis artikel di terbitan lokal. Januari 1919, misalnya, Tan menulis tentang hak berdaulat orang Minang untuk menentukan nasibnya sendiri (Poeze, 1988:73). Delapan bulan setelahnya, September 1919 dia memberikan pidato pada kongres ketiga PI di Amsterdam. Di mimbar kongres, Tan menegaskan peran Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Insulinde dalam mempersiapkan Indonesia menjadi bangsa yang terbebaskan (Poeze, 1988:80). Dalam uraiannya, dia menggunakan idiom-idiom marxis seperti proletar, struktur ekonomi, dan kesamaan hak yang perlu diwujudkan di Hindia Belanda. Pada fase ini, Tan telah terlibat dalam pergerakan kelompok kiri di Belanda dan diterima sebagai bagian dari grup, meskipun beberapa anggota berpendapat bahwa ide-ide revolusioner Tan

Malaka masih jauh dari jernih (Poeze, 1988:83). Struktur gagasannya perlahan semakin solid ketika dia kembali ke Sumatera dan menyaksikan basis material masyarakat kontradiktif di bawah kuasa kolonial.

Pada 8 November 1919 Tan Malaka pulang ke Hindia Belanda untuk mengambil tawaran menjadi guru di sekolah lokal yang dikelola oleh Senembah Maatschappij, perusahaan perkebunan milik investor Jerman yang berbasis di Deli, Sumatera Utara (Malaka, 2000a:99). Berbekal pengetahuan 'Eropa' dia menyaksikan kontradiksi yang tajam antara penjajah dan terjajah di area perkebunan. Pengalaman ini memberikan gambaran material yang gamblang bagi Tan. Dia memotret kondisi yang demikian sebagai 'kontradiksi tajam antara kapital dan labor serta antara penjajah dan terjajah' (Malaka, 2000a:69). Dalam memoarnya, dia memberikan petunjuk bagaimana basis material yang hadir di depan matanya berpengaruh pada refleksinya atas ketidakadilan dan menggambarkan realitas di hadapannya sebagai 'orang Indonesia kelas bawah yang memeras keringatnya sepanjang hari; yang hanya dibayar untuk mengisi perut; dan hidup seperti domba dalam kandang... inilah kelas bawah Indonesia yang disebut sebagai buruh rentan (Malaka, 2000a:74).

Meskipun dia optimis bekerja sebagai guru bagi anak-anak kuli dan menikmati pekerjaannya, terdapat tiga isu sentral yang mengganggu benaknya dan mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan revolusionernya ke Semarang. Pertama, kondisi perkebunan yang terisolasi membuatnya menjadi kurang produktif. Di salah satu suratnya kepada Horensma, Tan berkata bahwa 'Hidup

menjadi monoton dan menunjukkan kemandekan serta runtuhnya bangunan spiritual' (Poeze, 1988:116). Aktivitas sekolah yang padat ternyata mengambil banyak waktunya sehingga Tan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi produktif. Meskipun demikian, dia sempat menulis tiga artikel bersama *Het Vrije Woord*, terbitan berbahasa Belanda yang berorientasi Bolshevik (Poeze, 1988:122). Menurut Poeze, tiga seri publikasi tersebut merupakan hasil korespondensi Tan dengan Henk Sneevliet dan tokoh-tokoh komunis di Jawa (Poeze, 1988:125). Korespondensi ini kemudian menginspirasi Tan untuk pergi ke Semarang. Terlebih lagi, pada waktu itu, Tan berada di tengah konflik alot dengan direksi perkebunan karena perbedaan visi yang tajam (Malaka, 2000a:85). Tan akhirnya pergi meninggalkan Deli menuju Semarang pada February 1921 untuk bergabung dengan gelombang gerakan kiri. Manuvernya bersama PKI tidak bertahan lama sebab pada 13 Februari 1922, pemerintah kolonial mengusirnya dari Hindia Belanda dengan tuduhan mengganggu keterbitan umum melalui sekolah SI yang menjamur di beberapa kota sentral di Jawa. Sejak hari itu, Tan memulai hidup berpindah; dari kota ke kota; penjara ke penjara, sampai tahun 1942 ketika dia kembali pulang.

D.2. Arena Produksi dan Liberasi Pengetahuan: Press dan Sekolah Rakyat

Jawa di paruh pertama 1920an menyaksikan puncak dari pergerakan nasionalis yang bermula pada tahun 1912 (Shiraishi, 1990:xv). Shiraishi menamai periode ini sebagai periode zaman bergerak di mana ide-ide tersintetisasi dan

pergerakan nasionalis tumbuh (Shiraishi, 1990:91). Jangkauan organisasi politik semakin meluas baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam banyak kasus, organ partai memainkan peran sentral dalam ekspansi tubuh pergerakan oleh karena sifatnya yang mampu memberikan tautan kolektif. Sarekat Islam – organisasi di mana nantinya Tan Malaka terlibat aktif – misalnya, berhasil menggaet simpati publik melalui distribusi organ partai dan kampanye strategis yang mengekspresikan solidaritas akar rumput (Shiraishi, 1990:48). Pada tahun 1913, publikasi SI menjamur hampir di tiap-tiap cabang organisasi. Selain Sarotomo sebagai organ utama di Solo, SI juga mengelola *Oetoesan Hindia* di Surabaya, *Sinar Djawa* di Semarang, *Kaoem Muda* di Bandung, dan *Pantjaran Warta* di Batavia (Shiraishi, 1990:49). Praktik ini tidak hanya unik pada SI. *Insulinde Solo*, misalnya pun, memiliki *Panggoegah*, terbitan berbahasa Jawa, yang diduga memegang peranan penting dalam mobilisasi petani pada tahun 1918-1920 (Shiraishi, 1990:137-8).

Menurut Anderson, media vernakular semacam itu merepresentasikan episode sejarah print-capitalism, yang memberikan gambaran 'cara relasi baru yang menautkan solidaritas, kuasa, dan linamasa yang bermakna kolektif... yang memperlebar kemungkinan tumbuhnya kesadaran bersama untuk berpikir dan berelasi dalam kerangka kolektif melalui metode yang betul-betul baru' (Anderson, 1983:96). Lebih lanjut, print-capitalism membuka peluang munculnya sentiment persatuan. Meskipun demikian, dalam artikel ini penulis berpendapat bahwa print-capitalism tidak hanya bekerja sebagai medium yang 'menautkan

individu-individu' namun juga sebagai lokasi epistemik di mana pengetahuan tumbuh dalam kondisi yang diskriminatif dan opresif. Meminjam konsep Subaltern dari Ranajit Guha, Grosfugel memahami kondisi perlawanan melalui pengetahuan dapat dimaknai sebagai 'perspektif epistemik subaltern' di mana 'seperangkat pengetahuan yang tumbuh dari bawah memiliki kapasitas untuk menyediakan perspektif kritis terhadap pengetahuan hegemonik dalam sirkulasi relasi kuasa yang timpang' (Grosfugel, 2011:214).

Pada masa zaman bergerak di mana pengetahuan hegemonik digenggam oleh pemerintah kolonial; kaum intelegensia Indonesia mengartikulasikan kritiknya melalui publikasi organ partai, yang didistribusikan kepada kelompok-kelompok akar rumput, sebagai bagian dari fellow subaltern. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1913 Suwardi Suryaningrat ditangkap oleh pemerintah kolonial karena artikel 'Jika Aku Menjadi Belanda' yang dipublikasikan oleh De Express, organ Indische Partij (IP) (Shiraishi, 1990:119). Sebagai pemegang kebenaran, pemerintah kolonial menganggap kritik semacam ini dapat mengancam tatanan publik yang kemudian kerap digunakan oleh pihak Belanda sebagai dasar penangkapan para nasionalis (Salverda, 2004:74). Sebaliknya, bagi Suwardi dan nasionalis yang lain, kritik pada kekuasaan merupakan jalan untuk memetakan rute pembebasan dengan menampilkan realitas kolonial di Hindia Belanda.

Pada 2 Januari 1922, Sinar Hindia, terbitan kolaboratif SI dan PKI bahkan mengutarakannya secara lebih jernih bahwa brosur sebagai media vernakular mengandung daya ubah pola pikir yang

efektif. Artikel tersebut ditulis oleh Soekin, anggota SI, yang secara terang menyajikan kontradiksi antara 'logika mistika' dengan rasionalitas. Soekin percaya bahwa gerak lawan menentang kolonialisme haruslah berbasis skema pikir rasional, seperti yang ditulisnya:

"Bagi kebanyakan orang di Hindia Belanda, menggunakan pengetahuan baru masalah menjadi kesulitan oleh karena mereka tidak menguasai cara berpikir baru [cetak miring di sumber original]. Semangat mereka masalah kuno dan percaya bahwa kekuatan supranatural masih menjadi elemen utama penyusun cara berpikir mereka. Sisa-sisa periode religius masih bercokol di kepala orang Hindia Belanda... untuk mempromosikan pergerakan dan cara pikir baru, kita harus mencoba sekeras mungkin untuk menjauhkan mereka dari cara pikir yang salah dengan menawarkan propaganda kita melalui brosur" (Soekin, 1922 dalam Subijanto, 2017:1358).

Media vernakular, dalam hal ini adalah arena produksi pengetahuan kritis yang membebaskan baik dari kuasa kolonial maupun kecenderungan berpikir yang kurang strategis. Arena lain yang juga memegang peranan penting sebagai lokasi epistemik adalah pergerakan nasional sekolah rakyat. Genealogi dari pergerakan ini adalah politik etis Van Deventer yang memperkenalkan sistem pendidikan barat ke Hindia Belanda. Program sekolah Belanda kemudian mencetak kelas menengah terdidik di Hindia Belanda (Karsono, 2013:209). Sebagian dari mereka bekerja di sektor-

sektor ekonomi, beberapa mendirikan terbitan lokal, dan tokoh-tokoh seperti Suwardi mendirikan Sekolah Rakyat (Karsono, 2013:111). Was-was terhadap perkembangan sekolah rakyat, Belanda melabeli model sekolah semacam ini sebagai Wilde Onderwijs (sekolah liar) (Dhakidae, 2000:97). Meskipun demikian, di hadapan pemerintahan kolonial yang represif di sekitar tahun 1920-1930, sekolah liar justru memegang peranan penting dalam penyebaran ide-ide nasionalisme, kedaulatan, dan semangat pembebasan dalam imajinasi besar perjalanan menuju pembebasan dan dunia modern (Penders, 1968:209).

Tan Malaka tiba di Jawa dalam semangat pergerakan yang bergeliat dengan gencarnya persebaran media vernakular dan sekolah rakyat sebagai bentuk pelembagaan produksi pengetahuan bagi yang-terjajah. Dia terlibat secara dekat dengan kedua arena tersebut. Tan Malaka mulai membuka Sekolah SI pada 21 Juni 1921. Pergerakan ini tumbuh cukup cepat dan berbagai kelompok mulai akrab dengan model sekolah Tan Malaka (Poeze, 1988:174). Sebagai bagian dari propaganda, Tan juga menulis artikel tentang sekolah yang dikelolanya, misalnya tulisan berseri bertajuk Semarang dan Onderwijs yang dipublikasikan oleh Soeara Rakjat berurutan pada Oktober dan November 1921 (Poeze, 1988:190). Di dalam terbitan tersebut, Tan menjelaskan bahwa karakter sekolah yang ideal adalah arena belajar yang emansipatif dan mendorong orang untuk berpikir ke arah kemerdekaan berpikir (Malaka [1921], 1987:4).

Di hadapan kondisi absennya institusi pengetahuan yang solid, media vernakular dan

sekolah rakyat menyediakan ruang pertarungan diskursus soal pembebasan bagi kelompok nasionalis untuk 'menyadarkan' Hindia Belanda akan kondisi kontradiktif. Meminjam perkataan Skinner, kedua institusi tersebut menyusun 'rangkai-deskripsi' artikulasi kolektif yang membentuk pemahaman akan kondisi material yang nyata. Di samping itu, sekolah rakyat dan media vernakular juga mengkonstruksi tujuan bersama untuk mencerahkan (*enlightening*) dan membebaskan (*liberating*) Indonesia dengan berbasis pengetahuan rasional seperti yang diungkapkan oleh Soekin dalam artikel Sinar Hindia dan semangat pendidikan emansipatif seperti yang dipraktikkan oleh Tan Malaka. Oleh karenanya, media vernakular dan sekolah rakyat berperan penting dalam membentuk 'rangkai-deskripsi' proyek pembebasan melalui produksi pengetahuan yang menyediakan seperangkat artikulasi linguistik sebagai senjata untuk menentang pemegang kebenaran, yakni pemerintah kolonial. Inilah yang menjadi penanda dan latar penting bagi perkembangan pemikiran Tan Malaka. Di periode selanjutnya, dia mengembangkannya ke arah pendekatan ilmiah (saintifik) melalui metode materialisme dialektis yang akan dielaborasi di bagian berikut ini.

D.3 Soal Kontradiksi: Materialisme Dialektis Sebagai Metode

Analisis materialis Tan Malaka muncul kali pertama di dalam brosur Naar de Republiek Indonesia yang ditulisnya di Canton pada 1924. Dia mengkritisi Budi Utomo dan National Indische Partij (NIP) karena

tidak memiliki kecakapan analisis struktural masyarakat kolonial. Baginya, kesalahan dalam memahami kondisi sosio-ekonomi membuat program-program organisasi hanya terlihat layaknya daftar belanja yang tidak bermakna politis. Kritik ini juga disampaikan dalam dua buku yang ditulisnya, yakni Aksi Massa (1926) dan Semangat Moeda (1926). Dalam ketiga buku tersebut, dia berpendapat bahwa perjuangan pembebasan bangsa dari kolonialisme harus menggunakan prinsip-prinsip analitik yang berbasis pada kontradiksi. Materialisme dialektis, baginya, adalah perkakas pikir yang cukup efektif digunakan untuk membongkar kontradiksi utama realitas kolonial.

Tan memahami materialisme dialektis sebagai 'perjuangan kelas yang akan mengubah esensi peradaban menuju masyarakat kapitalis, yang pada kelanjutannya akan membawa bentuk-bentuk kehidupan tinggi, yakni komunisme' (Malaka [1924] [1926], 1987:28). Dalam pandangan Tan Malaka, Partai Komunis Indonesia harus fokus pada perjuangan kelas yang terpusat pada pertentangan antara kolonial dengan masyarakat terjajah, yang 'jika berhasil, liberasi Indonesia akan termaterialisasi' (Malaka [1926], 1987:39, 2015:32). Tantangan utama atas perjuangan ini, bagi Tan, adalah 'distribusi' perkembangan kapitalisme di Hindia Belanda yang tidak merata. Kondisi ini menciptakan perbedaan basis material, yang membentuk 'ketimpangan' kesadaran, seperti yang diungkapkannya bahwa 'perbedaan taraf kemajuan industri memiliki efek pada kualitas manusia yang berbeda pula... kesadaran petani di Jawa yang dikelilingi pabrik gula berbeda dengan pemetik Sagu di Ternate yang mendengar peluit

keretapun belum pernah' (Malaka, 2015:39-40). Inilah yang menjadi dasar baginya untuk menolak konfrontasi-langsung PKI pada pemerintah kolonial di tahun 1926-1927. Dalam pandangannya, kekuatan proletar belumlah merata, olehnya pergerakan tidak akan sanggup mencapai dampak yang meluas (Malaka, 2015:117). Baginya, tugas PKI adalah menyiapkan basis perjuangan yang strategis dengan mengorganisasi buruh secara efektif.

Meskipun dalam Naar De Republiek Indonesia (1924), Aksi Massa (1926), dan Semangart Muda (1926), Tan Malaka telah menyinggung materialisme dialektis, intensi yang terlihat dalam elaborasinya adalah pengaplikasian metode tersebut dalam kerangka praktik untuk menyusun program partai. Dimensi saintifik materialisme dialektis baru muncul dalam tulisan-tulisan Tan Malaka setelah tahun 1942, paska kembalinya ke Indonesia.

Elaborasi materialisme dialektis secara sistematis dituangkannya dalam Madilog, karya magnum opus yang ditulisnya selama bekerja sebagai mandor buruh tambang di Banten. Tujuan Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) dalam pengantarnya adalah untuk 'menyediakan metode berpikir bagi bangsa terjajah' (Malaka, 1942:19). Menurut Tan Malaka, metode berpikir baru diperlukan oleh karena 'Bangsa Indonesia, dalam masa-masa kitab, masih terbelenggu kegelapan dan diselimuti kepercayaan mistika, logika akan menjadi barang baru yang seharusnya diterima dan diajarkan secara bersamaan dengan ide dialektika dan materialisme (Malaka, 1942:17). Dalam semesta materialis Tan Malaka, 'cara berpikir saintifik menjadi penting karena mengedepankan observasi

empiris dalam pembuktian hipotesis' (Malaka, 1942:58).

Tan Malaka melihat kontinuitas antara prosedur ilmiah dan cara pandang materialis sebagai jalan menuju perubahan alih-alih menggunakan perspektif idealis dalam usaha pembebasan. Sebagai ilustrasi, Tan menggunakan Revolusi 1917 untuk memperlihatkan strategi berpikirnya: 'Lenin, sebelum Oktober 1917, setelah mendalami materialisme dialektis dan mempertimbangkan kontradiksi kelas mengajak pengikutnya untuk menentang kekuasaan dengan dasar berikut ini:

- (1) Secara ekonomi dan politik, atmosfer Russia memenuhi prasyarat revolusi
- (2) Tubuh partai terorganisasi dengan baik,
- (3) Seluruh rakyat Russia telah menjadi bagian Partai Komunis
- (4) Musuh di dalam dan di luar Russia terpecah belah. Lenin menyusun dasar-dasar yang tepat dan layak, sebagai hasil, eksperimennya sukses.

Dengan ini, teorinya terbukti benar (Malaka, 1942:115, 138).

Metode materialisme dialektis kemudian menjadi latar sentral pemikiran Tan Malaka, terutama pada gaya gagasan sintetisnya yang mengedepankan aspek kontradiksi kelas alih-alih sentimen adversarial, Tan memahami pertentangan sebagai metode untuk mengurai fenomena kompleks yang melibatkan silang sengketa relasi kuasa. Baginya, proyek pembebasan perlu didasari oleh realitas material agar tidak terkecoh oleh perjuangan-perjuangan identitas yang semu.

E. Tan Malaka, Kontradiksi, dan Ilmu Sosial Indonesia

E.1 Periode Paska Kemerdekaan dan Orde Lama

Arena politik pertama Tan Malaka untuk mempraktikkan materialisme dialektis paska kepulangannya ke tanah air adalah masa-masa mempertahankan kemerdekaan dari Belanda di tahun 1945-1948. Periode ini ditandai oleh tensi politik antara grup diplomasi, yang menghendaki negosiasi dengan Belanda; dan grup perjuangan yang menolak kompromi dan bersikeras mewujudkan merdeka 100%. Tan Malaka berada di kelompok kedua sebagai salah satu pemimpin kelompok oposisi Persatuan Perjuangan (PP). Dia mengkritisi penandatanganan Perjanjian Linggadjati dan Renville yang menandai 'kembalinya mahkota kerajaan Belanda bersamaan dengan arus modal asing' (Malaka, 2000:124). Baginya, kemerdekaan Indonesia yang telah dideklarasikan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan tanpa sedikitpun gesture kompromi atau negosiasi. Pandangannya berdasarkan pada kontradiksi-utama antara Belanda-sekutu dengan bangsa Indonesia yang perlu dijaga agar pembebasan secara utuh dapat terwujud.

Dalam terma yang lebih praxis, Tan Malaka membayangkan terciptanya front nasional yang melampaui identitas politik di luar register kelas, sehingga dapat memusatkan sumber daya pada satu gerakan politik besar. Persatuan Perjuangan adalah kendaraan baginya untuk memutar roda front nasional tersebut. Dalam pidatonya pada kongres pertama PP di Purwokerto 1946, Tan menegaskan bahwa 'PP bukanlah perjuangan parlementer atau kursi pemerintahan, melainkan

perjuangan bangsa untuk mencapai Indonesia yang merdeka 100%' (Malaka, 1946). Kepemimpinannya di PP berhasil menggaet dukungan 132 organisasi nasional dari berbagai kalangan baik partai politik, front agama, dan sayap militer (Malaka, 2000:187). Meskipun demikian, PP tidak bertahan lama setelah para pemimpinnya ditangkap oleh Aboe Bakar Loebis dengan perintah dari pemimpin besar revolusi. Pada Maret 1946, Tan Malaka, Abikusno Tjokrosujoso, dan Yamin dipenjarakan dengan tuduhan 'opposisi-ilegal' (Anderson, 1972:326; Poeze, 2008:313-316; lihat juga Malaka, 2000:120).

Peristiwa Madiun 1948 menjadikan situasi – yang terlampau tegang di antara front yang plural – semakin berantakan. Tan Malaka, yang pada akhirnya dibebaskan pada September 1948 dan membentuk Partai Murba sebagai kendaraan politiknya, dibunuh oleh Letnan Soekotjo pada 19 Februari 1949 (Poeze, 2008:321).

Crawford (2018:39) dalam refleksi kritisnya terhadap Tan berkesimpulan bahwa 'meskipun Tan mengklaim bahwa marxisme memberikan pendekatan fleksibel terhadap politik, di mana strategi dapat diterapkan pada kondisi tertentu dengan ketetapan saintifik, metode marxis Tan Malaka terbukti membawanya pada kondisi terdesak, di penjara, dan jauh dari kekuasaan.' Menurut Crawford, hal ini dikarenakan pandangan Tan Malaka tidak berubah sejak tahun 1920an. Dirinya hanya fokus pada kontradiksi Belanda dan Bangsa Indonesia tanpa menyadari perubahan lanskap politik pada pergerakan nasionalis (Crawford, 2018:38-39). Berbeda dengan Crawford, penulis berpendapat bahwa kekalahan Tan lebih dikarenakan oleh penggunaan 'kekerasan' (coersive

violence) penguasa, yang membawa PP pada akhir pergerakannya. Di lain sisi, metode materialisme dialektis Tan Malaka yang fokus pada kontradiksi-utama dibaca dari sudut pandang yang sangat praktikal, bukan ditaruh sebagai strategi berpikir dan cara melihat arah sejarah. Sebagai hasilnya, revelansi dari hubungan antagonistik tertutup oleh friksi-friksi ideologi politik yang sibuk pada kemenangan kelompok diplomasi.

Dalam perkembangannya, di tubuh PKI sendiri, Tan Malaka dieksklusi secara pemikiran dan personal. Aidit menganggap Tan Malaka sebagai tokoh yang berkhianat pada keputusan partai di tahun 1926-1927. Njoto dalam kuliahnya tentang materialisme dialektis dan historis di Aliarcham Akademi pada 3 Juni 1964 hanya menyinggung Madilog tanpa mengelaborasinya lebih lanjut (Njoto, 1964:4). Njoto beranggapan bahwa 'Banyak anggota PKI yang memahami marxisme secara tidak menyeluruh, Tan Malaka adalah salah satunya yang mengkombinasikan materialisme dialektis dan historis dengan Agama' (Njoto, 1964:4-5). Sentimen sejarah sepertinya mengarahkan 'wajah' Tan Malaka sebagai tokoh problematis yang 'mengganggu' tubuh kekuasaan. Pengakuan akan kontribusi Tan Malaka pada jalannya sejarah republik baru terwujud ketika pada tahun 1963 Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Meskipun demikian, pemikirannya tetap belum terbahas, terlebih di arena ilmu sosial Indonesia.

Paska kemerdekaan, ilmu sosial Indonesia masih dalam proses membangun. White (2005:114) berpendapat bahwa tradisi debat teoretis belum terbangun secara solid. Di periode 1950'an, ilmuan sosial dari Indonesia tidak mencapai jumlah yang

signifikan. Di samping itu, secara sumber daya ilmu sosial Indonesia masih bergantung pada kerangka teoretis barat. Kondisi inilah yang membentuk tekstur ilmu sosial Indonesia pasca kemerdekaan.

Koentjaraningrat (1987:220) merekam bahwa di lingkungan ilmu politik, George Mc.T Kahin dari Cornell University memimpin Modern Indonesia Project yang fokus pada kegiatan pendokumentasian revolusi Indonesia, 1945-1949. Selain itu, proyek tersebut juga memberikan studi anthropologis yang dipimpin oleh R. Textor dan D.E Willmott tentang community development dan studi komunitas tionghoa di Semarang (Koentjaraningrat, 1987:220). Di samping kajian secara kerangka teoretis, ilmu sosial Indonesia pasca kemerdekaan bergantung pada donor internasional. Pada pertengahan tahun 1950an beberapa universitas di Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta menerima hibah buku soal pembangunan ekonomi pertanian dari Council on Economic and Cultural Affairs (CECA), sebuah organisasi filantropis yang dibentuk oleh John D. Rockefeller III di tahun 1953 (Rockefeller Archive Centre (RAC), 1955:286). Program yang demikian dikelola dalam kerangka diskursus menuju pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Koentjaraningrat (1987:220), selain donor internasional, peranan penting pengarusutamaan studi pembangunan salah satunya dimulai oleh Benjamin Higgins yang memimpin proyek penelitian bersama Centre of International Studies of Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Di hadapan kerangka struktural fungsional studi pembangunan yang lebih mengutamakan kerangka pemikiran 'harmoni' dan fungsi sistemik dari masyarakat, materialisme dialektis Tan Malaka

yang mempromosikan pandangan kontradiktif tidak mendapat tempat. Kondisi republik yang sedang dalam proses integrasi untuk mengkonsolidasi kepentingan plural membutuhkan legitimasi pengetahuan yang mendukung fantasi tersebut. Tjondronegoro (1994:59-78) berpendapat bahwa 'dalam payung wacana developmentalisme pendekatan marxis lebih berfungsi sebagai gerakan politik alih-alih dipahami sebagai metode saintifik.'

Melihat konteks Indonesia pasca kemerdekaan, materialisme dialektis Tan Malaka hanya beredar di masa-masa keterlibatannya dalam revolusi mempertahankan kemerdekaan. Gabungan antara ketegangan politik yang intens dan fantasi untuk mengintegrasikan Indonesia membuat pemikiran Tan Malaka berada di tepian dan dianggap tidak dapat mendukung arah pembangunan negara. Kecenderungan ini semakin tegas ketika Indonesia memasuki babak sejarah orde baru yang otoriter dan membunuh pemikiran gerakan kiri dengan melabelinya sebagai register antagonis dari Pancasila.

E.2. Periode Orde Baru

Peristiwa 1965 menandai kemenangan developmentalisme dan bermulanya kekuasaan rezim militer. Selama masa transisi, komunisme secara resmi dilarang melalui TAP MPRS No.27 1966, yang menyebutkan bahwa 'ajaran komunisme/marxisme-leninisme secara esensial bertentangan dengan Pancasila... setiap aktivitas di Indonesia yang bertendensi menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam berbagai bentuk dan

manifestasinya, termasuk penggunaan media-media untuk kepentingan sirkulasi atas ide yang bersangkutan resmi dilarang.'

Berangkat dari momentum tersebut, Rezim Orde Baru menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan Pancasila sebagai ideology nasional untuk melegitimasi agenda pembangunan. Dalam merawat implementasi 'ideologi negara' tersebut, Orde Baru menggunakan cara-cara represif sekaligus instrument diskursif melalui pendidikan. Pada praktiknya, metode represif dan 'kekerasan' diinstitutionalisasi dalam setiap lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun sipil, termasuk lingkungan perguruan tinggi dan institusi lain di mana pengetahuan diproduksi. Sebagai konsekuensinya, pendekatan marxisme dan pendekatan kiri lainnya kurang berkembang oleh karena cap ideologi terlarang.

Untuk memastikan ideologi komunis tersapu dari diskursus publik dan Pancasila diterima sebagai perspektif ideal untuk memandang dunia, Rezim Orde Baru menginisiasi ideological engineering bernama Penataran P4 (Penataran Pedoman dan Penghayatan Pancasila), yang berlangsung selama 1978-1998. Kursus tersebut mengandung tiga materi utama, yang menggarisbawahi keterkaitan antara Pancasila dan agenda pembangunan (developmentalism) (Morfit, 1981:845). Kepentingan utama dari Orde Baru adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembangunan negara yang dianggapnya 'tidak-berkembang' pada era pemerintahan Soekarno.

Rezim Orde Baru kemudian menyusun rencana pembangunan lima tahun sejak tahun 1969

dan berakhir pada 1994 (Visser dan Nordholt, 1995:6). Implikasi dari rencana ini adalah masuknya modal asing. Dalam konteks ini, ilmu sosial dikerangkai sebagai instrumen untuk melegitimasi tujuan tersebut. Secara umum, ilmuan sosial dikerahkan secara menyeluruh untuk mendukung agenda nasional. Sebagai contoh, pada salah satu kesempatan Suharto meminta Asosiasi Ekonom Indonesia untuk menyusun cetak biru demokrasi ekonomi yang konsisten dengan arah implementasi Pancasila (Hadiz & Dhakidae, 2005:8). Di samping itu, kebijakan pembangunan Orde Baru juga melibatkan pendekatan kekerasan dalam kerangka kapitalisme seperti perebutan paksa tanah rakyat, pengusiran besar-besaran pemukiman warga, dan eksploitasi lahan untuk pertambangan (Hadiz, 2015:106-135). Kritik intelektual terhadap kekerasan rezim dianggap sebagai 'penghambat pembangunan' dan untuk itu perlu ditindak tegas karena tidak sejalan dengan ideologi negara.

Ignas Kleden berpendapat bahwa 'Sebagai upaya melayani kepentingan negara, ilmu sosial di era Orde Baru hanya disikapi dalam kerangka instrumental alih-alih critical' (Kleden, 1995:23). Menurut Kleden, jenis praktik keilmuan yang demikian ditujukan semata-mata sebagai jalan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya demi generalisasi yang 'dominatif' (Kleden, 1995,1998). Dengan demikian, baginya, ilmu sosial mengalami politisasi oleh rezim Orde Baru sesuai dengan kepentingannya. Olehnya, ilmuan sosial di zaman Orde Baru cenderung melayani agenda nasional alih-alih mengkritisi praktiknya (Kleden, 1997:21).

Aditjondro memiliki pandangan yang berbeda, baginya Kleden justru terjebak generalisasi ala Orde Baru dalam memindai karakter ilmuwan sosial di Indonesia. Menurut Aditjondro, spektrum ilmuwan sosial Indonesia dapat dikategorikan dengan menggunakan taksonomi Gramscian di mana *organic* dan *traditional intellectuals* membentuk lanskap produksi pengetahuan (Aditjondro, 1995:37). Baginya, Adnan Buyung Nasution, Arnold Clement, dan Arif Budiman kala itu adalah *organic intellectual* yang melakukan aktivitas politik mengkritik rezim secara *praxis* maupun keilmuan. Di masa Orde baru, Materialisme Dialektis Tan Malaka – dalam hal ini – dibahas oleh dan di dalam ranah yang digeluti oleh intelektual organik.

Bahasan materialisme dialektis Tan Malaka muncul kembali di tahun 1977 oleh Alfian yang artikelnya dipublikasikan oleh Prisma edisi khusus di mana di dalamnya terdapat elaborasi pemikiran Sjahrir, Agus Salim, Kahar Muzakar, Amir Sjarifudin dan tokoh nasional lainnya. Selain tetap terjebak dalam wajah usang soal Tan Malaka yang ‘revolusioner’, Alfian juga membahas pemikiran Tan Malaka, termasuk materialisme dialektisnya.

Alfian memahami materialisme dialektis Tan Malaka sebagai ‘cara berpikir yang realistis, pragmatis, dan fleksibel... untuk menyingkirkan logika mistika menuju metode saintifik dalam rangka meraih pembebasan’ (Alfian, 1977:62). Ada poin yang sedikit luput dari pemahaman Alfian akan ‘materialisme’ di mana ia terjebak dalam jargon ‘pragmatisme’ yang sebenarnya berlainan dengan hubungan antara basis material dengan proyek pembebasan. Meskipun demikian, terdapat satu poin menarik yang dielaborasinya di akhir tulisan.

Seolah-olah mengkritik kondisi otoriter, Alfian bertanya dengan sinis ‘Apa yang Tan Malaka akan katakan hari ini? Apakah dia berkata bahwa revolusi sedang berlangsung?’ (Alfian, 1977:65-67).

Daniel Dhakidae berpendapat bahwa Alfian membangkitkan kembali pemikir Indonesia yang dibunuh tiga kali, yakni oleh pemerintahan Soekarno, oleh Aidit, dan terakhir oleh Orde Baru (Dhakidae, 2000:476). Di samping itu, Alfian juga membahas konsep central pemikiran Tan Malaka, yakni materialisme dialektis yang diletakkannya dalam konteks revolusi-yang-tertunda. Menurut Dhakidae (2000:477), ‘membawa Tan Malaka dalam konteks represif merupakan pengingat bahwa cita-cita revolusi menyeluruh harus dirawat baik di dalam gelanggang politik maupun pengetahuan.’

Usaha untuk membawa pemikiran Tan Malaka ke permukaan juga muncul di tahun 1987 ketika Yayasan Massa mencetak ulang Parlemen atau Soviet. Di buku tersebut, W. Suwanto, salah satu pemimpin Partai Murba memberikan kata pengantar yang cukup komprehensif dan menyinggung perjalanan hidup serta intelektual Tan Malaka. Baginya, ‘dalam usaha menemukan jalan alternatif untuk melanjutkan semangat pembebasan, karya-karya Tan Malaka layak dipertimbangkan sebagai perkakas untuk berpikir ulang tentang situasi nasional dan internasional (Suwanto, 1987:11). Suwanto mengakhiri diskusinya dengan menekankan bahwa ‘cara berpikir yang bertemu dengan prinsip, norma, dan nilai prosedur saintifik sangat dibutuhkan oleh pemimpin dan pemikir Indonesia, yang memiliki kemampuan serta komitmen untuk menerapkan cara berpikir berbasis pengetahuan’ (Suwanto, 1987:11).

Dalam merefleksikan karya Tan Malaka, Suwanto cenderung menyoroti elemen pragmatis dari pemikiran saintifiknya, sedangkan Alfian lebih fokus pada ide revolusi yang berdasar pada metode materialisme dialektis. Pembahasan Suwanto dan Alfian menunjukkan satu tahapan bahwa gagasan Tan Malaka kembali diperbaharui dan dikontekstualisasikan dalam kondisi sosial-politik yang berbeda dari konteks kemunculannya. Meskipun demikian, di lain sisi, materialisme dialektis Tan Malaka juga dikritisi di dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Abu Jihan di Panji Masyarakat bertahun 1984. Di terbitan tersebut, materialisme dialektis Tan Malaka dikritisi oleh karena pengandaian Tan bahwa tiada kekuatan pendorong lain di luar reaksi negatif dari dua atau lebih kekuatan yang membentuk sintesis. Bagi Abu Jihan, "Tan Malaka hanya melihat sejarah hanya sebagai relasi antara dua kekuatan utama... Ia mengabaikan hati nurani yang juga menggerakkan manusia; inilah area khusus yang tidak dapat dijamah Tan, terutama di Madilog (Abu Jihan, 1984:n.p). Dalam kritiknya, Abu Jihan cenderung fokus pada - apa yang dimaksud Tan - sebagai dimensi ide, di mana basis material tidak dihitung sebagai penggerak utama jalannya sejarah; sesuatu yang bagi Tan justru berkekuatan lebih besar dibandingkan ide-ide abstrak soal kemanusiaan.

Ketiga pembahasan Tan Malaka di era orde baru tersebut setidaknya mengandung tiga poin penting. Pertama, gagasan Tan Malaka dibahas melalui platform yang relatif alternatif oleh karena pelarangan ajaran komunis. Karya Alfian diterbitkan oleh Prisma; kata pengantar oleh Suwanto dipublikasikan tidak melalui penerbit besar; dan

kritik Abu Jihan di Panji Masyarakat memperlihatkan pola bahwa di hadapan rezim represif, karya Tan Malaka tetap dibahas meskipun harus melalui platform sidestream. Kedua adalah fakta bahwa materialisme dialektis Tan Malaka terus bergerak mengikuti arah sejarah baik untuk diapresiasi maupun dikritisi. Ketiga, ide Tan Malaka secara umum, dan materialisme dialektisnya secara khusus dapat dikontekstualisasikan ke dalam situasi sosial-politik yang berbeda. Konsisten dengan pandangan Bikhu dan Berkhi (1973) bahwa gagasan dapat melintas trans-kontekstual jika sampai pada level abstrak. Hal ini terlihat dari ketiga ilustrasi Alfian (1977), Abu Jihan (1984), dan Suwanto (1987) yang cenderung fokus pada tujuan-tujuan dan ide-ide umum emansipatif alih-alih menginterpretasikannya dalam kerangka partikular.

F. Kesimpulan: Refleksi atas Materialisme Dialektis Tan Malaka Hari Ini

Periode reformasi menandai babak baru sejarah Indonesia, di mana ekspresi publik relatif terakomodasi. Meskipun demikian, TAP MPRS No.27 1966 masih berlaku dan justru ditetapkan mengandung relevansi yang kontekstual pada tahun 2003 melalui TAP MPR NO.1/2003. Klausul tersebut kemudian menjadi basis legal untuk terus merawat sentiment anti-komunisme tanpa mempertimbangkan kandungan saintifik yang ada dalam struktur pembentuk wacananya. Di ruang publik, Tan Malaka lebih dikenal sebagai pahlawan nasional yang komunis dan musuh kelompok-kelompok religius.

Di lain sisi, arus utama ilmu sosial Indonesia di era kontemporer justru menunjukkan kelanjutan dari wacana pembangunan orde baru. Meskipun ada beberapa perkembangan signifikan dalam produksi pengetahuan, kecenderungan praktik ilmu sosial masih terjebak melayani kepentingan negara (Hadiz & Dhakidae, 2005:22-23). Nugroho (2005:160-161) dalam penelitiannya tentang perguruan tinggi di Indonesia menemukan bahwa institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dituntut untuk mendatangkan sumber daya dalam konteks neoliberal, yang mengandaikan program-program 'ramah pasar.' Dalam kondisi yang demikian, materialisme dialektis Tan Malaka tidak akan menarik di hadapan pasar-pengetahuan oleh karena sifatnya yang konfliktual, kontradiktif, dan cenderung mengkritisi pembangunan yang didukung oleh pemikiran neoliberal di mana pasar menjadi roda utama yang menggerakkan mesin pertumbuhan. Di lain sisi, Indonesia sedang berada pada kondisi antagonisme yang lebih berdasar pada politik identitas alih-alih kondisi senjang yang berbasis formasi material. Dalam hal ini, materialisme dialektis Tan Malaka dapat menjadi pintu masuk untuk mengembalikan cara membaca realitas berdasarkan basis material; sehingga usaha-usaha menuju pembebasan tidak terjebak pada perjuangan identitas yang semu dan mempromosikan hubungan adversarial alih-alih antagonisme politik.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George J. 1995. "Implications of a Shift from "Pro-State" to "Pro- Society" Social Scientists", in Leontine Visser and Nico Schulte Nordholt (eds), *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism*, CASA Comparative Asian Studies, Amsterdam: VU University Press: 35-42.
- Aidit, Dipa Nusantara. 1995. *Djalan ke Demokrasi Rakjat bagi Indonesia: Pidato sebagai laporan Central Comite Kepada Kongres Nasional ke-V PKI dalam Bulan Maret 1954*, Djakarta: Jajasan Pembaruan.
- Anderson, Benedict. 1972. *Java In a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- Alfian. 1977. "Tan Malaka: Pejuang Revolusioner Yang Kesepian". *Prisma*, Vol. 8 (August): 57-76.
- Crawford, Oliver. 2018. *The Political Thought of Tan Malaka*. Cambridge: Cambridge University.
- Grosfoguel, Ramon. 2011. "Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political-Economy." *Transmodernity: Decolonial Thinking, and Global Coloniality*.
- Hadiz, Vedi. 2015. "Capitalism, Primitive Accumulation and the 1960's Massacres: Revisiting the New Order and its Violent Genesis". *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol.16 (2): 306-135.

- Hadiz, Vedi and Daniel Dhakidae. 2005. "Introduction", in Vedi Hadiz and Daniel Dhakidae (Eds), *Social Science and Power in Indonesia*. Jakarta: Equinox and Pasir Panjang: Institute of Southeast Asia Studies: 1-30.
- Jarvis, Helen. 1991. "Introduction", in Tan Malaka, *From Jail to Jail, Vol. 1*. Ohio: Ohio Center for International Studies.
- Jihan, Abu. 1984. "Tan Malaka dan Semut". *Panji Masyarakat*.
- Kahin, George Mc.Turnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell, University Press.
- Karsono, Sony. 2013. *Indonesia's New Order, 1966-1998: Its Social and Intellectual Origins*. Ph.D Dissertation. Ohio: Ohio University Press.
- Kleden, Ignas. 1995. "Social Science in Indonesia: Action and Reflection in the Southeast Asian Perspective", in Leontine Visser and Nico Schulte Nordholt (Eds), *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism*. CASA Comparative Asian Studies, Amsterdam: VU University Press: 9-34.
- Kleden, Ignas. 1998. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1987. "Anthropology in Indonesia". *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol.18 (2): 217-234.
- Malaka, Tan. 1987 (1921). *Semarang dan Onderwijs*. Jakarta: Yayasan Massa.
- Malaka, Tan, 1987 (1922). *Parlemen atau Soviet*. Jakarta: Yayasan Massa.
- Malaka, Tan. 1987 (1925). *Naar de 'Republiek Indonesia' (Menuju Republik Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Massa.
- Malaka, Tan. 2015 (1926). *Semangat Muda*. Bandung: Segarsy.
- Malaka, Tan. 2000 (1926). *Aksi Massa*. Jakarta: TePLOK Press.
- Malaka, Tan. 2014. *Madilog: Materialisme, Dialektika, dan Logika*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Morfit, Michael. 1981. "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government". *Asian Survey*, Vol. 21 (8): 838-851.
- McVey, Ruth T. 1965. *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Mrazek, Rudolf. 1972. "Tan Malaka: A Political Personality's Structure of Experience". *Indonesia*, Vol.14: 1-48.
- Mrazek, Rudolf. 1994. *Sjahir: Politics and Exile in Indonesia*. Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University.
- Njoto. 1965. *Strive for the Victory of the Indonesian Revolution with the Weapon of Dialectical and Historical Materialism: A Speech at the Aliarcham Academy of Social Science on June 3, 1964*. Peking: Foreign Language Press.
- Nugroho, Heru. 2005. "The Political Economy of Higher Educations: the University as an Arena for the Struggle of Power", in Vedi

- Hadiz and Daniel Dhakidae (Eds), *Social Science and Power in Indonesia*. Jakarta: Equinox and Pasir Panjang: Institute of Southeast Asia Studies: 143-166.
- Parekh, Bhikhu and R.N Berki. 1973. "The History of Political Ideas: A Critique of Q. Skinner". *Journal of History of Ideas*, Vol.34, (6): 163-184.
- Penders, Christian L.M. 1968. *Colonial Education Policy and Practice in Indonesia*, Ph.D Dissertation, Canberra: Australian National University.
- Poeze, Harry A. 1988. *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik I*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Poeze, Harry A. 2008. *Tan Malaka. Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1-4* (trans. Hersri Setiawan). Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor.
- Salverda, Reinier. 2004. "Image and Counterimage of the Colonial Past", in Douwe Fokkema & Frans Grijzenhout (Eds), *Dutch Culture in a European Perspective: 1650-2000 Accounting for the Past*. New York: Palgrave Macmillan.
- Shiraishi, Takashi. 1990. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926*. Ithaca: Cornell University Press.
- Skinner, Quentin. 1969. "Meaning and Understanding in The History of Ideas" in Quentin Skinner, *History and Theory* Vol.8 (1): 3-53.
- Soekin.1922 (January 2). *Pergantian Hawa dari Tahoen 1921 ke 1922 [The change of atmosphere from 1921 to 1922]*. Sinar Hindia, n.pag.
- Subijanto, Riane. 2017. "Enlightenment and the Revolutionary Press in Colonial Indonesia", *International Journal of Communication*, Vol 11(1): 1357-1377.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tjondronegoro. 1995. "Indonesia's Social Science Agenda: A Personal View", in Leontine Visser and Nico Schulte Nordholt (Eds), *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism*. CASA Comparative Asian Studies 17, Amsterdam: VU University Press: 59-78.
- Visser, Leontine and Nico Schulte Nordholt. 1995. "Science, State, and Society: The Case of Southeast Asia", in Leontine Visser and Nico Schulte Nordholt (Eds), *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism*. CASA Comparative Asian Studies, Amsterdam: VU University Press: 1-8.
- White, Ben. 2005. "Between Apologia and Critical Discourse: Agrarian Transition and Scholarly Engagement in Indonesia", in Vedi Hadiz and Dhanial Dhakidae (Eds), *Social Science and Power in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing and Pasir Panjang: Institute of Southeast Asia Studies: 107-142.

Yamin, Muhammad. 1946. *Tan Malaka: Bapak Republik Indonesia*. Moerba Berdjoeang: Djawa Timur.

Sumber Lain:

TAP MPRS [Provisional People's Deliberative Assembly Decree] NO.XXV/1996.

TAP MPR [People's Deliberative Assembly Decree] No.I/2003.